

PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DAN KINERJA PARTAI POLITIK TERHADAP SIKAP APATIS PEMILIH DALAM PEMILU 2014¹

Oleh : REZA FAHMI²JAMALDI.M.Ag³

Abstract

The aim of this research was finding an effect of educational politics and working activity of political party towards skeptical behavior of voters at national election in 2014. Quantitative method used as tool of analysis. Collecting data used; observation, psychological scale and interview. The research found that there were an effect of educational politic and working activity of political party towards skeptical behavior of voters at national election in 2014.

Key words: Educational Politics, Working Activity of Political Party and skeptical Behavior of Voters in Geberal Election.

PENDHULUAN

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mendapat dana hibah penelitian dari IAIN Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2014.

² Penulis adalah Dosen Psikologi Umum IAIN Imam Bonjol Padang; Alumni National University of Malaysia dan sedang menyelesaikan pendidikan Doktorat di Universitas Negeri Padang dalam bidang Ilmu Pendidikan. Alamat: Jalan Napak Tilas No. 10 Balai Gadang, Koto Tangah Padang 25178. Telp: 0751-484088 / Hp : 081270251544. Email: rezafahmi92@yahoo.co.uk.

³ Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang; Alumni Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Alamat: Jalan Bandes Parak Jigarang No. 32 B Rt 05 / Rw05 Kelurahan Anduring, Padang 25151. Hp : 081363230502. Email : jamalditanjung@yahoo.com.

itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain. Selanjutnya demokrasi sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam ikhtiar penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik sebagai sistem ataupun proses, demokrasi dalam dekade – dekade belakangan dianggap sebagai yang terbaik dibandingkan dengan sistem atau proses politik lainnya. Hal ini cukup beralasan karena demokrasi dianggap lebih mengedepankan aspek manusiawi dan kemanusiaan. Demokrasi juga dapat menghindari adanya penyalahgunaan dari kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan sebagaimana disebutkan oleh Giovanni Sartori: *“a system in which no one can choose himself, no one can invest him self with the power to rule, therefore, no one can arrogate to himself unconditional and unlimited power”*. Akan tetapi, demokrasi sebagai hasil kreativitas manusia tidak berarti hampa atas kritik dan gugatan. Banyak pihak yang secara terang-terangan menyatakan permusuhannya atas demokrasi. Demokrasi memang tidak utuh sempurna. Dan, fakta sejarah menyebutkan bahwa demokrasi pernah tercatat sebagai “biang keladi” atas terjadinya beberapa kesemerawutan sistem di beberapa negara di berbagai belahan dunia. Hitler, diktator Jerman, terpilih secara demokratis dalam sebuah masyarakat Jerman yang terdemoralisasi. Soeharto juga konon terpilih dengan sistem ini. Apalagi saat kepala daerah harus dipilih melalui sistem demokratis (PILKADA), semakin banyak pemimpin di negeri kita yang justru memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri, memperkuat pengaruh trah, dan memuluskan segala ambisi politik. Yang namanya demagog, penghasut, orang gila, pemimpi, dan pemimpin berdarah dingin, telah dan mungkin akan menjadi pemimpin lewat sistem ini.

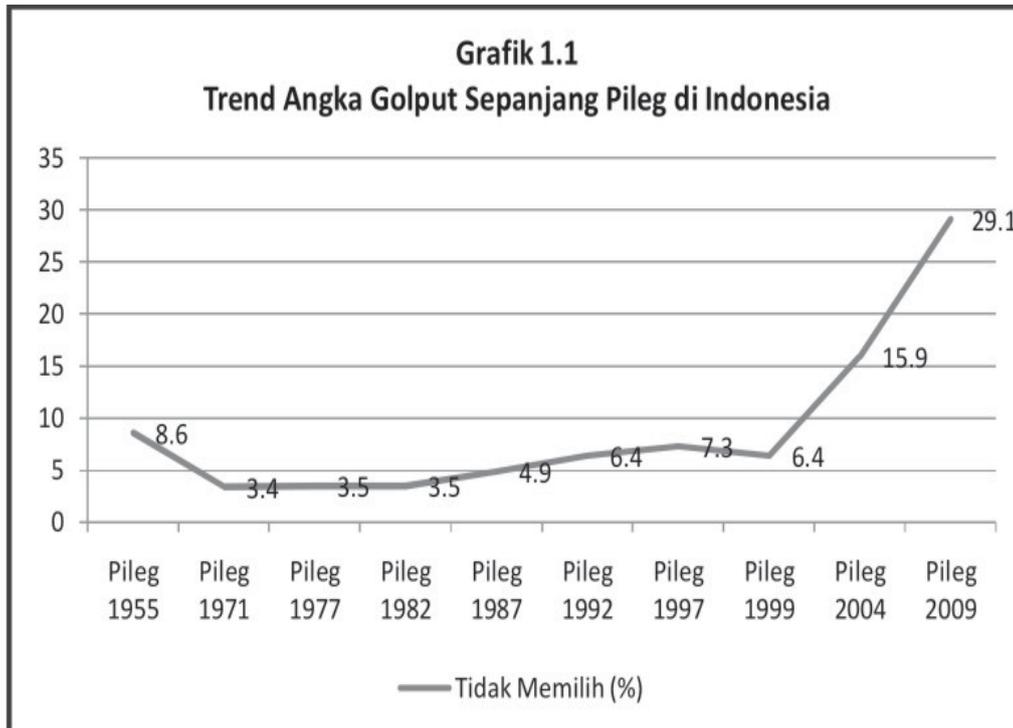
Banyak kalangan yang pesimis terhadap pemilu sehingga melahirkan gelombang apatisme⁴ terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Persis seperti yang

⁴ *Apatis adalah kurangnya emosi, motivasi atau antusiasme. Apatis merupakan istilah psikologis untuk keadaan ketidakpedulian, di mana seorang individu tidak menanggapi rangsangan kehidupan emosional, sosial atau fisik. Apatis depresi klinis dianggap tingkat yang lebih moderat dan didiagnosis sebagai gangguan identitas disosiatif dalam tingkat ekstrim. Aspek fisik apatis dikaitkan dengan kelelahan fisik, kelemahan otot dan kekurangan energi disebut letargi, yang memiliki banyak penyebab patologis juga. "Kamus istilah teknis dalam bidang kedokteran dan kesehatan," catatan Luis Rey, sikap apatis merupakan kata yang mengacu kepada istilah kejiwaan, dengan definisi berikut: "Seorang individu ditandai dengan ketidaktertarikan ketidakpedulian atau ketidakpekaan terhadap peristiwa, kurangnya minat atau keinginan". Apatis berasal dari apatheia Yunani. Pathos dalam bahasa Yunani, berarti "segala sesuatu yang mempengaruhi tubuh atau jiwa" dan keduanya sakit berarti, penderitaan, penyakit, dan keadaan jiwa untuk keadaan eksternal mampu menghasilkan emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan, nafsu. Jadi apatheia dapat berarti tidak adanya penyakit, kerusakan organ, seperti kurangnya gairah dan emosi. Galen pada abad kedua, menggunakan istilah apatheia terhadap somatik, mengacu pada tidak adanya lesi di dalam usus. Apatheia Istilah ini digunakan oleh Aristoteles (384-322 SM) untuk ketenangan, pingsan, dan kemudian dimasukkan ke dalam sekolah filsafat yang didirikan oleh Zeno (335-263 SM), yang disebut Stoicisme, untuk mengekspresikan suasana hati yang ideal dicapai oleh manusia selama hidupnya. Zenon adalah Cypriote Yunani pada tahun 313 SM ia pindah ke Athena, di mana ia mengkhotbahkan doktrin dan membuat banyak mualaf. Ia bertemu dengan murid-murid dan pengikutnya di tempat yang disebut Stoa Poikile, yang diterjemahkan sebagai "kolom serambi atau galeri bekerja". Stoa datang nama Stoic dan Stoicisme. Menurut Stoicisme, penderitaan muncul dari reaksi terangsang pada manusia dengan empat kelas emosi: kesedihan,*

dialami oleh masyarakat kita akhir-akhir ini ketika pemilihan umum semakin dekat. Hal ini memang sudah menjadi fenomena musiman menjelang pelaksanaan pemilu. Fenomena apatisisme publik ini tak lepas dari pola perilaku elektoral rakyat Indonesia sendiri yang kerap kali terjebak dalam politik pragmatis. Politik pragmatis, menurut Aboeprijadi Santoso, tidak hanya menandai sikap sebagian rakyat, tapi justru menjadi ciri pula dari ego politisi partai ataupun kontestan pemilu yang mengejar jabatan lewat kemenangan dalam pemilu. Dalam pelaksanaan demokrasi, apatisisme publik yang ditunjukkan oleh masyarakat kita menggambarkan suramnya masa depan. Melukiskan ketidakberdayaan mereka dalam menentukan sendiri masa depan. Seolah-olah pasrah menggantungkan segala asa kepada orang lain yang belum tentu ia kenal dalam menentukan pemimpinnya. Padahal, demokrasi seharusnya dipandang sebagai wujud pelaksanaan amanah. Baik amanah rakyat untuk memilih pemimpin demi kebaikan mereka semua, ataupun amanah pemimpin terpilih untuk mengayomi rakyat yang telah memilihnya. Dengan sikap yang pesimistik, bisakah amanah yang besar seperti kesempatan memilih dan dipilih dalam pemilu bisa ditepati? Pemilu sebagai sebuah realitas politik merupakan alat atau sarana menuju demokrasi sehingga sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap pemilu bisa saja dianggap penghalang proses demokratisasi dalam negeri ini. Apa pasal? Suara konsituen, walaupun hanya satu orang, jelas membawa dampak yang signifikan pada hasil pemilu secara keseluruhan. Sikap apatis dari masyarakat justru beresiko pada timbulnya efek negatif atas penyelenggaraan pesta demokrasi itu sendiri. Siapa yang akan bertanggungjawab jika kemudian terpilih pemimpin yang tidak amanah, berwatak preman, penghasut? Adalah tanggung jawab dari

ketakutan, keinginan dan kesenangan. Cita-cita Stoic adalah untuk mencapai apatheia, yaitu penerimaan dari peristiwa alam, sikap pasif terhadap rasa sakit dan kesenangan, penghapusan reaksi emosional, kurangnya gairah apapun. Apatheia, dalam kata-kata Aulus Gellio mendefinisikan perilaku kaum Stoik, "ingin apa-apa, tidak mengeluh, tidak marah dan tidak bersukacita". Stoicisme memiliki pengikut di Seneca dan Marcus Aurelius, yang berusaha untuk melepaskan penderitaan orang itu, nafsu dan emosi. Hanya pada abad ketujuh belas, menurut Dauzat, apatis diperoleh arti dari kemalasan. Dalam kamus ilmu kedokteran dan terkait, Litte dan Robin, 1873, adalah definisi berikut apatis: "Individu yang memiliki ketumpuhan moral, di mana seseorang berperilaku seolah tidak sensitif terhadap rasa sakit dan kesenangan dan pengalaman sejenis malas bergerak ". Tampaknya jelas bahwa makna saat ini apatis dalam kosakata medis berasal dari konsep kata estoicista filosofis, di mana pathos menyatakan suatu keadaan psikologis yang ditandai dengan sikap ketidakpedulian terhadap rangsangan, dan bukan versi organik, seperti Galen digunakan. Hanya dengan demikian kita dapat memahami ketidakpantasan jelas dari semantik kata dalam terminologi medis. Sumber: <http://id.shvoong.com/> Diakses 10 April 2013. Fakta semakin meluasnya Golput juga didasari oleh realitas sejarah yang buruk dalam sistem politik Indonesia di masa kediktatoran orde baru telah berpengaruh negatif terhadap pencitraan Partai Politik di Indonesia. Meskipun ada tiga Parpol yang di akui oleh pemerintah saat itu, namun orientasi politiknya hampir sama; menciptakan stabilitas politik dan keamanan bagi kekuasaan dan privelege-nya. Gerakan Mahasiswa 1998, berhasil menjatuhkan rejim Orde baru selanjutnya membuka peluang bagi perubahan politik yang lebih baik (baca; Demokratisasi). Namun, harapan ini tinggal harapan, Reformasi kehidupan politik ternyata tidak berjalan maksimal dan menjamurnya Partai Politik tidak mampu menjadi prasyarat untuk demokrasi yang lebih Accountable. Malah, keberadaan mesin-mesin penjagal demokrasi; Praktek pelanggaran HAM, pengambilan kebijakan tanpa konsultasi, Money Politik, Korupsi dan nepotisme di dalam tubuh birokrasi semakin menggerus nilai-nilai Demokrasi yang sebenarnya.

kita semua untuk mengantisipasinya. Demokrasi butuh kesiapan, integritas, dan juga kecerdasan. Lebih jauh sikap apatisme pemilih dalam Pemilihan Legislatif dapat digambarkan melalui banyaknya angka Golput dari waktu ke waktu yang digambarkan melalui Grafik 1. 1 di bawah ini :



MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Demokrasi memang tidak utuh sempurna. Dan, fakta sejarah menyebutkan bahwa demokrasi pernah tercatat sebagai biang keladi atas terjadinya beberapa kesemerawutan sistem di beberapa negara di berbagai belahan dunia.
2. Sebagai sebuah negara yang terlahir dengan cita-cita luhur berdikari, Indonesia telah berkali-kali mengganti sistem demokrasinya. Nilai-nilai demokrasi memang bisa dimaknai secara berbeda-beda tergantung pada isu-isu yang tengah hadir mewarnai kehidupan suatu bangsa. Essensi demokrasi adalah kekuasaan rakyat (government of rule by the people). Oleh karenanya, selama suara rakyat (*vox populi*) masih dianggap sebagai suara tuhan (*vox dei*).
3. Banyak kalangan yang pesimis terhadap pemilu sehingga melahirkan gelombang apatisme⁵ terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Persis seperti yang

⁵ *Apatis adalah kurangnya emosi, motivasi atau antusiasme. Apatis merupakan istilah psikologis untuk keadaan ketidakpedulian, di mana seorang individu tidak menanggapi rangsangan kehidupan emosional, sosial atau fisik. Apatis depresi klinis dianggap tingkat yang lebih moderat dan didiagnosis sebagai gangguan identitas disosiatif dalam tingkat ekstrim. Aspek fisik apatis dikaitkan dengan kelelahan fisik, kelemahan otot dan kekurangan energi disebut letargi, yang*

dialami oleh masyarakat kita akhir-akhir ini ketika pemilihan umum semakin dekat. Hal ini memang sudah menjadi fenomena musiman menjelang pelaksanaan pemilu. Fenomena apatisisme publik ini tak lepas dari pola perilaku elektoral rakyat Indonesia sendiri yang kerap kali terjebak dalam politik pragmatis.

4. Apabila sikap apatis dan sejenisnya dimiliki oleh generasi muda yang tergabung dalam pemilih pemula, maka sistem politik dan “corak politik” masa depan akan dipengaruhi secara signifikan, karena dari data yang dishare ke publik oleh berbagai sumber, jumlahnya cukup besar. Untuk pemilu 2014 yang akan datang tercatat kira-kira 20% adalah pemilih pemula, (bahkan dalam sebuah acara di UI Depok bersama *Center for Election and Political Party* (Pusat Pemilu dan Partai Politik), Wakil Ketua DPR-RI Pra mono Anung menyebutkan angka yang lebih besar lagi yakni 30 %). Sedangkan jumlah pemilih tetap adalah sebanyak 173-186 juta jiwa. Artinya kira-kira se banyak 34-37 juta jiwa adalah pemilih pemula. Jumlah ini sangat banyak bahkan dapat meme nangkan sebuah partai politik secara total pada partai yang yang mampu menggaet mereka dari target pendulangan suara.

SIGNIFIKANSI PENELITIAN

memiliki banyak penyebab patologis juga. "Kamus istilah teknis dalam bidang kedokteran dan kesehatan," catatan Luis Rey, sikap apatis merupakan kata yang mengacu kepada istilah kejiwaan, dengan definisi berikut: "Seorang individu ditandai dengan ketidaktertarikan ketidakedulian atau ketidakepekaan terhadap peristiwa, kurangnya minat atau keinginan". Apatis berasal dari apatheia Yunani. Pathos dalam bahasa Yunani, berarti "segala sesuatu yang mempengaruhi tubuh atau jiwa" dan keduanya sakit berarti, penderitaan, penyakit, dan keadaan jiwa untuk keadaan eksternal mampu menghasilkan emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan, nafsu. Jadi apatheia dapat berarti tidak adanya penyakit, kerusakan organ, seperti kurangnya gairah dan emosi. Galen pada abad kedua, menggunakan istilah apatheia terhadap somatik, mengacu pada tidak adanya lesi di dalam usus. Apatheia Istilah ini digunakan oleh Aristoteles (384-322 SM) untuk ketenangan, pingsan, dan kemudian dimasukkan ke dalam sekolah filsafat yang didirikan oleh Zeno (335-263 SM), yang disebut Stoicisme, untuk mengekspresikan suasana hati yang ideal dicapai oleh manusia selama hidupnya. Zenon adalah Cypriote Yunani pada tahun 313 SM ia pindah ke Athena, di mana ia mengkhotbahkan doktrin dan membuat banyak muaf. Ia bertemu dengan murid-murid dan pengikutnya di tempat yang disebut Stoa Poikile, yang diterjemahkan sebagai "kolom serambi atau galeri bekerja". Stoa datang nama Stoic dan Stoicisme. Menurut Stoicisme, penderitaan muncul dari reaksi terangsang pada manusia dengan empat kelas emosi: kesedihan, ketakutan, keinginan dan kesenangan. Cita-cita Stoic adalah untuk mencapai apatheia, yaitu penerimaan dari peristiwa alam, sikap pasif terhadap rasa sakit dan kesenangan, penghapusan reaksi emosional, kurangnya gairah apapun. Apatheia, dalam kata-kata Aulus Gellio mendefinisikan perilaku kaum Stoik, "ingin apa-apa, tidak mengeluh, tidak marah dan tidak bersukacita.". Stoicisme memiliki pengikut di Seneca dan Marcus Aurelius, yang berusaha untuk melepaskan penderitaan orang itu, nafsu dan emosi. Hanya pada abad ketujuh belas, menurut Dauzat, apatis diperoleh arti dari kemalasan. Dalam kamus ilmu kedokteran dan terkait, Litre dan Robin, 1873, adalah definisi berikut apatis: "Individu yang memiliki ketumpuhan moral, di mana seseorang berperilaku seolah tidak sensitif terhadap rasa sakit dan kesenangan dan pengalaman sejenis malas bergerak ". Tampaknya jelas bahwa makna saat ini apatis dalam kosakata medis berasal dari konsep kata estoicista filosofis, di mana pathos menyatakan suatu keadaan psikologis yang ditandai dengan sikap ketidakedulian terhadap rangsangan, dan bukan versi organik, seperti Galen digunakan. Hanya dengan demikian kita dapat memahami ketidakpantasan jelas dari semantik kata dalam terminologi medis. Sumber: <http://id.shvoong.com/> Diakses 10 April 2013.

Signifikansi penelitian adalah: (1) Bagi pemerintah, mencari solusi terhadap peningkatan jumlah Golput dari masa ke masa. (2) Bagi Parpol (partai politik), membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politik yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat sebagai pemilih dalam pemilu. (3) Bagi pemilih atau masyarakat, meminimalisir sikap apatis masyarakat terhadap peran penting pemilu dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel.

METODE PENELITIAN

Model rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Adapun yang dimaksudkan dengan metode kuantitatif disini adalah metode yang bersifat realitas (dapat diklasifikasikan, komkrit, teramati dan terukur). Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat yang telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilu 2014 (Pemilu Legislatif), di berdomisili di Kota Padang. Sungguh demikian populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah antara lain : warga yang tinggal di daerah Padang Utara dan Padang Timur. Pemilihan kedua kawasan dilakukan secara random untuk memenuhi kaedah penelitian kuantitatif yang menekankan pentingnya pengambilan sampel secara acak atau *random*. Disamping itu pada kedua kawasan tersebut telah terjadi penurunan jumlah angka pemilih pada Pemilu 2009 yang salah satunya diduga karena sikap apatisisme pemilih dalam pemilu legislatif ketika itu. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *probability random sampling* (simple random sampling). Adapun metode pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling) yang dipilih dengan mengundi unsure-unsur penelitian atau satuan-satuan elementer dalam populasi. Hal sedemikian dipilih mengingat unit elementer (unit penelitian) telah tersusun dalam kerangka sampling (sampling frame) berupa daftar pemilih yang terdapat di TPS di kawasan Padang Timur dan Padang Utara. Terdapat tiga bentuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain: (1) angket atau kuesioner. Yaitu menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada para pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 yang dilibatkan sebagai responden dalam penyelidikan ini. (2) Skala Psikologi. (3) Dokumentasi, yaitu mengkaji bahan-bahan penyelidikan terdahulu dalam bentuk buku, jurnal atau karya ilmiah lain yang dapat menunjang proses penyelidikan. Satu set skala yang digunakan adalah dalam bentuk *skala likert* lima mata. Sedangkan pada bagian identitas responden pertanyaan berkisar biodata responden. Cara penilaian terhadap kuesioner didasarkan pada bentuk item pertanyaan yang diajukan. Apakah item pertanyaan yang diajukan bersifat positif atau item pertanyaan yang diajukan bersifat negatif. Pada Tabel 3.1 berikut ini akan ditunjukkan tata cara penilaian berdasarkan item pertanyaan yang bersifat positif dan negatif:

TABEL 1.1 : Tata Cara Penilaian Item Pernyataan

Item Positif	Skor	Item Negatif	Skor
SS	4	SS	1

S	3	S	2
TS	2	TS	3
STS	1	STS	4

Sumber : Hasil Penelitian

Meurut Black dan Champion terdapat dua aspek penting bagi sebuah alat ukur penelitian adalah: (1) aspek validitas alat ukur penelitian, (2) aspek reliabilitas alat ukur penyelidikan . Selanjutnya Kerlinger menyatakan pula bahwa, "Reliabilitas adalah keajegan hasil yang diperoleh dari alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Sehingga apabila dilakukan ujian yang sama akan menghasilkan temuan yang konsisten pada masa yang berlainan. Reliabilitas untuk pengujian alat ukur adalah dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* yang memberikan petunjuk kepada derajat reliabilitas suatu pengujian yang dijalankan menurut *Cronbach's Alpha*. Kaedah *Cronbach's Alpha* sesuai untuk digunakan untuk mengukur reliabilitas bagi item-item yang menggunakan *skala likert*. Oleh karenanya penyelidik menggunakan kaedah *Cronbach's Alpha* untuk mengkaji aspek reliabilitas alat ukur. Mengingat item pernyataan yang diajukan berbentuk skala likert, maka hasil pengujian reliabilitas alat ukur penelitian menggunakan kaedah *Cronbach's Alpha*. Hasil penelitian ini mendapati nilai alpha : 0, 817.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,817	,822	30

Selanjutnya reliabilitas alat ukur merujuk kepada konsistensi nilai-nilai yang diperoleh oleh seorang responden penelitian yang sama pada waktu dan keadaan pengujian yang berbeda . Sedangkan Kaplan menyatakan bahwa nilai alpha yang baik pada pengujian reliabilitas adalah 0.80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini tergolong baik. Artinya alat ukur yang digunakan ini dapat dan layak untuk digunakan dalam penyelidikan. Penelitian ini direncanakan berjalan selama lebih kurang empat bulan. Data dikumpulkan melalui kuesioner atau angket dan skala psikologi serta dokumentasi. Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, maka dijelaskan terlebih dahulu tujuan penelitian ini kepada mereka. Selanjutnya responden diminta untuk menjawab lebih kurang 50 item pernyataan dalam jangka waktu lebih kurang 35 menit. Setelah responden menyerahkan hasil jawaban terhadap kuesioner yang diajukan maka, langkah selanjutnya adalah pengecekan ulang terhadap semua jawaban yang diberikan, serta mengkonfirmasi jawaban yang dirasakan masih terdapat berbagai informasi yang belum tergalai dari proses pengumpulan data yang menggunakan kuesioner itu. Data yang dihimpun pada hari kerja (senin hingga jum'at). Data yang dikumpulkan pada hari kerja, waktu pengambilan data adalah antara jam 08.00 sampai dengan jam 16.00. Paket statistik yang digunakan sebagai alat bantu penganalisaan data adalah *Statistical*

Package for the Social Sciences (SPSS Versi 18). Data yang tidak menepati jawaban dan tidak lengkap dianggap tidak valid dan tidak diproses lebih lanjut. Teknik analisa yang digunakan untuk melihat pengaruh adalah regresi sederhana untuk melihat pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih dalam Pemilu Legislatif tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan penghasilan . Lebih jauh pada Tabel 4.1 di bawah ini :

No	Karakteristik Responden	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	128	54,47
		Perempuan	107	45,53
		Total	235	100,00
2	Usia	17 thn – 20 thn	25	10,64
		21 thn – 24 thn	68	28,94
		≥ 25 tahun	142	60,42
		Total	235	100,00
2	Pekerjaan	PNS	52	22,13
		Swasta	183	77,87
		Total	235	100,00
4	Penghasilan	≤ Rp 500.000,-	115	48,94
		Rp 1000.000-Rp1.500.000,-	87	37,02
		≥ Rp 2000.000,-	33	15,04
		Total	235	100,00

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas diperoleh gambaran bahwa, mayoritas responden adalah laki laki. Kemudian rentang usia responden yang terbanyak adalah ≥ 25 tahun. Selanjutnya pekerjaan yang dimiliki oleh responden pada umumnya bekerja pada sektor swasta. Sedangkan pada aspek penghasilan, diperoleh gambaran bahwa, umumnya mereka berpenghasilan kurang dari Rp 500.000,-.

B. Hasil Analisa Kuantitatif

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,817	.783	50

Correlations

Correlations

		Pendidikan Politik	Kinerja Parpol	Sikap Apatisme
Pendidikan Politik	Pearson Correlation	1	,316(**)	,057
	Sig. (2-tailed)		,000	,419
	N	235	235	235
Kinerja Parpol	Pearson Correlation	,316(**)	1	,232(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,001
	N	235	235	235
Sikap Apatisme	Pearson Correlation	,057	,232(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,419	,001	
	N	235	235	235

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,317(a)	,100	,091	8,041

a Predictors: (Constant), Percaya, serap

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1425,928	2	712,964	11,026	,000(a)
	Residual	12803,545	233	64,664		
	Total	14229,473	235			

a Predictors: (Constant), Percaya, serap

b Dependent Variable: kualitas

Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	51,929	5,910		8,787	,000
Kinerja Parpol	,190	,041	,320	4,618	,000
Apatisme Pemilih	-,010	,041	-,017	-,246	,806

a Dependent Variable: kualitas

Berdasarkan analisa data diatas, diperoleh gambaran bahwa pada pengujian korelasi *pearson* (product moment) didapati r_{hitung} adalah 0,316 (untuk analisa hubungan antara pendidikan politik dengan sikap apatisme pemilih) dan 0,057 pada pengujian korelasi antara kinerja partai politik dan sikap apatisme pemilih. Sedangkan nilai r_{tabel} pada kedua peubah tersebut adalah 0,221. Sehingga $r_{hitung} > r_{tabel}$, $H_0 =$ Diterima, pada penguian hubungan antara pendidikan politik dan sikap apatisme pemilih. Artinya tidak ada hubungan antara kedua peubah tersebut. Kemudian pada pengujian hubungan antara kinerja partai politik dengan sikap apatisme pemilih diperoleh hasil $r_{hitung} < r_{tabel}$ $H_0 =$ Ditolak. Sehingga hal ini bermakna bahwa, ada hubungan antara kinerja partai politik dengan sikap apatisme pemilih. Angka $R\ square = 0,100$ (adalah pengkuadranan dari koefisien korelasi antara $0,317 \times 0,317 = 0,100$). $R\ square$ dapat disebut sebagai koefisien determinan yang dalam hal ini berarti : hanya terdapat 10% pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih. Sedangkan sisanya ($100\% - 10\% = 90\%$) disebabkan oleh faktor lain. Seperti; karakter pribadi dari calon legislatif yang akan dipilih, karya nyata dari para calon legislatif dan catatan hitam partai politik yang mengikuti Pemilu 2014 (seperti ; korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di tubuh partai tersebut), sikap fanatisme atau loyalitas semu dari pemilih dan sebagainya.

Kemudian pada pengujian koefisien regresi diperoleh $t_{hitung} = 8,787$ sedangkan $t_{tabel} = 1,671$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, $H_0 =$ Ditolak. Artinya ada pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih dalam pemilu legislatif 2014.. Selanjutnya nilai probabilitas adalah 0,000. Hal ini jauh lebih rendah dari $= 0,05$. Sehingga $0,000 < 0,05$ maka $H_0 =$ Ditolak. Artinya pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih dalam pemilu legislatif 2014 adalah bersifat nyata atau signifikan. Sikap apatisme dalam pemilu yang dilakukan oleh pemilih juga di pandang sebagai bagian dari penerapan hak politik yang dimiliki oleh warga negara. Di mana warga negara tidak saja dilindungi oleh Undang-Undang untuk memberikan hak suaranya, namun juga diberi kebebasan untuk tidak memilih atau Golput. Tentunya hal ini tidak lepas dari fakta sejarah politik Indonesia pernah diwarnai oleh pengalaman buruk terkait campur tangan negara dalam hal hak untuk memilih dan dipilih pada masa Orde Baru, ketika terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap kaum yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu (Golput). Sejarah buruk itu akan berulang, apabila negara melakukan stigmatisasi, apalagi kriminalisasi terhadap kaum Golput dalam Pemilu 2009. Semestinya publik tidak terjebak dalam debat tentang Golput yang amat potensial memecah

belah bangsa serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Sebagai contoh, keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Golput, yang apabila dinilai negara harus tetap berdiri di atas kepentingan semua warganegara dan tidak serta merta meneruskan fatwa haram Golput itu sebagai bagian dari kebijakan negara yang mengikat semua warga negara.

Golput memang merupakan masalah klasik dan universal dalam kehidupan politik. Pembicaraan tentang ini selalu menjadi berita menarik menjelang pemilu di negara mana pun. Istilah golput dalam peta politik Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1971, terhadap mereka yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. *Lebih tinggi lagi, dalam produk hukum tertinggi di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 E disebutkan: "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Hak memilih di sini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak, terserah pemilihnya⁶. Dari sudut hukum, jelas sekali kalau memilih dan dipilih adalah hak, demikian pula secara hak asasi. Hak untuk memilih merupakan hak perdata warga negara, demikian juga hak untuk berpendapat. Tidak ada hukum apa pun yang menyebutkan mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, akan dikenakan sanksi atau dikriminalkan oleh negara.* Padahal sesungguhnya Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil presiden. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun undang-undang, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷ dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden/wakil presiden sepenuhnya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu. Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat. Setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Untuk itu, negara harus melindungi hak politik warga negara itu dari berbagai ancaman yang berasal dari kelompok masyarakat atau institusi negara. Jaminan perlindungan itulah yang akan menentukan kualitas pemilu.

⁶ Dyah Permata Budi Asri. 2010. PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HAK UNTUK PEMILIH DAN TIDAK MEMILIH (GOLPUT) DALAM PEMILU 2009. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009

⁷ HaM meliputi antara lain : 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk memperoleh pendidikan. 3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. 5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks politik HAM meliputi : Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; Hak membuat dan mendirikan partai politik / partai politik; dan organisasi politik lainnya; Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

Dalam Pemilu legislatif yang baru saja usai terdapat kenyataan bahwa sebagian masyarakat Indonesia (20 %, menurut data Lingkaran Survey Indonesia⁸) merupakan Golput atau tidak mempergunakan hak pilihnya, baik hal tersebut karena kesalahan dari KPU karena tidak masuknya mereka dalam DPT ataupun karena kemauan sendiri dari masyarakatnya. Untuk hal tersebut sebagian masyarakat punya pandangan yang berbeda. Prinsip HAM universal menyebutkan bahwa Negara wajib menjamin hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Karenanya, setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini. Hak ini pada pokoknya, menjamin setiap warga negara untuk secara bebas (freely) turut serta dalam urusan publik dengan memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif. Karenanya, hak ini juga berkaitan dengan hak yang lain dan tidak dapat dipisahkan, yakni: kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul (freedom of expression, assembly and association). Penjelasan di atas mampu memberikan pemahaman kepada kita bahwa, sebagian pemilih tidak memilih dan lebih bersikap apatis dalam pemilu karena mereka beranggapan bahwa menjadi Golput (Golongan Putih) yang nota bene tidak memilih dalam pemilu diasumsikan sebagai sebuah pilihan dan menjadi sebuah cerminan penerapan hak asasi manusia.

Beberapa temuan yang menguatkan sikap apatisisme pemilih dalam pemilu, utamanya dalam pemilu legislatif 2014 adalah : *Pertama, Bagi masyarakat, pelaksanaan pemilu di Indonesia dinilai masih sekadar pesta demokrasi yang tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan politik selanjutnya. Kedua, ketidakpercayaan kepada kontestan (partai politik).* Mereka menganggap bahwa tidak ada figur andalan yang dapat mewakili aspirasi mereka. Ini dibuktikan dengan beberapa kali penyelenggaraan pemilu. Para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih tidak dapat berfungsi mengemban aspirasi politik mereka. Kondisi kehidupan politik yang lebih baik setelah pelaksanaan pemilu ternyata tidak berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. *Malah yang muncul justru konflik berkepanjangan antar elite politik atau parpol pemenang pemilu.* Melihat kondisi seperti itu maka jelas rakyat akan merasa semakin kecewa, sehingga akhirnya mereka tidak lagi percaya kepada *elite politik* dan parpol yang ada. Masyarakat merasa *elite politik* belum mampu membawa makna yang cukup berarti dalam menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut ditambah lagi dengan tidak seriusnya wakil rakyat dalam sidang-sidang membahas agenda penting bangsa. Akibatnya, membuat Dewan selalu lamban dalam merespons suatu masalah. Dari kondisi ini, mereka menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tidak ada gunanya, hanya membuang energi dan waktu saja. Salah satu tolok ukur keberhasilan pemilu adalah peran serta aktif dalam memilih di luar golongan putih. Sebagai tolok ukur paradoksalnya (ketidakberhasilan) adalah rendahnya peran serta parpol terhadap pendidikan politik serta kekecewaan terhadap terhadap praktik politik

⁸ Dyah Permata Budi Asri. 2010. PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP HAK UNTUK PEMILIH DAN TIDAK MEMILIH (GOLPUT) DALAM PEMILU 2009. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009

parpol dan *elit politik* memberikan wacana negatif di benak pemilih. Dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa, minimal ada empat faktor: mengapa orang enggan untuk aktif berperan dalam pemilu: (1) Kekecewaan sebagian publik terhadap parpol; (2) Parpol sebagian kaya akibat *money politics*; (3) KPU dan pengawas di daerah minim melibatkan *civil society*; (4) Sistem pemilu yang rumit.

Seterusnya terdapat beberapa landasan partisipasi politik⁹ bisa dibangun melalui : (1) kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. (2) kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. (3) lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan. (4) Partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan (5) golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilu pada saat ini telah menjadi suatu unsur yang diharuskan untuk melegitimasi pemerintahan yang terbentuk. Pemilu juga dijadikan sebagai salah satu tolok ukur demokrasi. Suatu negara tidak dapat dikatakan demokrasi jika

⁹ Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Dan secara etimologis, kata politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Jadi, Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Dalam hal partisipasi politik, Rousseau menyatakan bahwa “Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan, maka negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama.” (a) Berbagai bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain: Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara. (b) Lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan terhadap kebijakan pemerintah. (c) Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya kampanye menjadi pemilih aktif, menjadi anggota DPR, menjadi calon presiden yang dipilih langsung dan sebagainya. (d) Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya. www.ui.ac.id

belum menggelar pemilu dalam salah satu program politik mereka. Namun ada negara yang benar-benar menerapkan pemilu secara demokratis untuk kepentingan warganya, ada juga negara yang menerapkan itu sebagai formalitas belaka. Jika pemilu diterapkan sebagai formalitas semata, itu akan menciderai partisipasi dan suara rakyat, karena yang tercapai bukan keinginan rakyat, tapi keinginan rezim yang berkuasa. Fenomena ini sering terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia semasa rezim orde baru. Kala itu pemilu yang diselenggarakan tidak murni untuk menampung suara rakyat, tapi diatur untuk memperpanjang kekuasaan Golkar yang merupakan partai yang diikuti oleh Soeharto. Pemilu pada saat itu hanya dijadikan simbolisasi saja di Indonesia.

Kemudian beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pengujian korelasi *pearson* (product moment) didapati r_{hitung} adalah 0,316 (untuk analisa hubungan antara pendidikan politik dengan sikap apatisme pemilih) dan 0,057 pada pengujian korelasi antara kinerja partai politik dan sikap apatisme pemilih. Sedangkan nilai r_{tabel} pada kedua peubah tersebut adalah 0,221. Sehingga $r_{hitung} > r_{tabel}$, $H_0 =$ Diterima, pada penujian hubungan antara pendidikan politik dan sikap apatisme pemilih. Artinya tidak ada hubungan antara kedua peubah tersebut. Kemudian pada pengujian hubungan antara kinerja partai politik dengan sikap apatisme pemilih diperoleh hasil $r_{hitung} < r_{tabel}$ $H_0 =$ Ditolak. Sehingga hal ini bermakna bahwa, ada hubungan antara kinerja partai politik dengan sikap apatisme pemilih.
- (2) Angka $R^2 = 0,100$ (adalah pengkuadranan dari koefisien korelasi antara $0,317 \times 0,317 = 0,100$). R^2 dapat disebut sebagai koefisien determinan yang dalam hal ini berarti : hanya terdapat 10% pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih. Sedangkan sisanya ($100\% - 10\% = 90\%$) disebabkan oleh faktor lain. Seperti; karakter pribadi dari calon legislatif yang akan dipilih, karya nyata dari para calon legislatif dan catatan hitam partai politik yang mengikuti Pemilu 2014 (seperti ; korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di tubuh partai tersebut), sikap fanatisme atau loyalitas semu dari pemilih dan sebagainya.
- (3) Kemudian pada pengujian koefisien regresi diperoleh $t_{hitung} = 8,787$ sedangkan $t_{tabel} = 1,671$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, $H_0 =$ Ditolak. Artinya ada pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih dalam pemilu legislatif 2014.. Selanjutnya nilai probabilitas adalah 0,000. Hal ini jauh lebih rendah dari $= 0,05$. Sehingga $0,000 < 0,05$ maka $H_0 =$ Ditolak. Artinya pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatisme pemilih dalam pemilu legislatif 2014 adalah bersifat nyata atau signifikan.

Manajemen pengelolaan sebuah partai politik tidak terlepas dari ideologi atau platform partai itu dibentuk, karena ideologi suatu partai politik diibaratkan sebagai napas kehidupan partai tersebut yang melalui itu aspirasi masyarakat sebagai konstituennya diperjuangkan ataupun untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Sebagaimana digambarkan oleh Katz dan Mair menggunakan istilah wajah organisasi partai untuk menunjukkan tiga konteks yang dihadapi partai. *Wajah pertama adalah partai pada akar rumput. Pada level ini partai menghadapi konteks lokal, partai lokal, pendukung, serta masyarakat pemilih. Wajah organisasi partai yang kedua adalah partai pada level pusat. Pada level ini partai menghadapi konteks nasional, partai-partai lain, dan negara. Wajah organisasi partai yang ketiga adalah partai pada level pemerintahan. Pada level ini partai menghadapi konteks dalam pemerintahan, fraksi-fraksi lain, komisi, dan negara*¹⁰

Dari ketiga wajah partai tersebut sangat penting untuk segera dibenahi karena partai politik memiliki peranan yang penting dalam memajukan kehidupan berdemokrasi bangsa. Pertama; Wajah yang pertama yakni partai pada akar rumput; pada dasarnya hubungan partai politik dengan masyarakat sangat sederhana, partai politik membutuhkan suara pemilih dalam pemilihan umum, artinya partai politik harus lebih responsif serta mempunyai kemampuan mendengar dan menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat sebelum partai politik tersebut mengeluarkan program-program dan kebijakan partai. Ruang ini merupakan ruang yang penting bagi tumbuh kembangnya suatu partai politik karena pada akar rumput inilah seharusnya pengkaderan anggota partai dimulai sehingga partai tidak kewalahan dalam memilih kader untuk saling berkontestasi pada pemilihan umum. Kedua; wajah partai yang kedua adalah partai politik pada level pusat; pada level ini partai dalam membuat rencana kerja ataupun kebijakan tetap harus berkoordinasi dengan partai pada level akar rumput karena partai pusat merupakan payung pendukung aktifitas dan koordinator berbagai kepentingan. Ketiga; wajah partai politik pada level pemerintahan; manuver-manuver politik yang dilakukan partai politik pada level ini dimaksudkan agar daerah lebih mempunyai bargaining power terhadap pemerintah pusat guna mengedepankan kepentingan daerah. Sedangkan komunikasi yang terbangun antara partai politik dengan konstituennya haruslah merupakan komunikasi dua arah, dengan demikian akan terbangunnya hubungan yang erat antara partai politik dengan konstituennya, karena anggota partai yang berada ditengah-tengah masyarakat berfungsi sebagai sensor yang dapat mengetahui masalah dan kebutuhan masyarakat dan pada umumnya mereka berusaha mengkomunikasikan program partai kepada masyarakat luas walaupun tingkat loyalitas dari mereka bukan merupakan jaminan terhadap eksistensi partai politik tersebut. Cara lain untuk membenahi partai politik yaitu melalui penekanan terhadap tingkat pelembagaan partai politik itu sendiri baik itu secara struktural

¹⁰ Lih. ¹. I Ketut Putra Erawan, *Mission Possible : Reformasi Kepartaian di Indonesia*, Draft Materi Pengantar Diklat Penguatan Kapasitas Partai Politik.

maupun kultural. Yang dimaksudkan disini adalah pelembagaan secara struktural melalui cara mempolakan perilaku partai politik dan secara kultural dengan mempolakan sikap atau budaya. Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural. Sehingga sebuah partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik itu dana yang berasal dari iuran para anggota maupun sumbangan dari para simpatisan untuk membiayai operasional partai maupun kampanye pada saat pemilihan umum dilaksanakan, oleh karena itu pengelolaan sumber keuangan partai juga merupakan hal yang penting untuk dibenahi dengan cara tetap memberikan laporan keuangan secara transparan kepada seluruh anggota partai maupun konstituennya secara rutin, karena salah satu sumber terjadinya konflik internal didalam tubuh partai politik adalah sumber dana serta penggunaannya yang tidak jelas, jadi untuk meminimalisir konflik tersebut cara yang dilakukan yaitu melakukan audit keuangan partai politik dengan jujur dan hasilnya diumumkan kepada seluruh anggota dan konstituen partai.

Selanjutnya kami berpendapat, jika suatu negara ingin masyarakatnya terlibat secara aktif dalam proses politik, maka pemerintah yang bersangkutan harus mengupayakan akses pendidikan setinggi-tingginya dan peningkatam kesejahteraan rakyat. Dengan begitu partisipasi masyarakat akan tinggi dalam pemilu. Selain itu negara tersebut harus menerapkan sistem demokrasi dalam setiap sendi pemerintahan. Krena jika negara tersebut belum demokrasi maka penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis sulit untuk diwujudkan. Untuk dapat mencegah sikap *apatisme* pemilih dalam pemilu maka, hendaknya dilakukan beberapa langkah diantaranya : (a) Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. (b) Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. (c) Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. (d) Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. (e) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Berikutnya tiga institusi yang bisa memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatnya kesadaran politik warga untuk terlibat dalam pemilu secara aktif (tidak apatis dalam pemilu) adalah : (1) Keluarga, merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Bagi anak, keputusan bersama yang dibuat di keluarga bersifat otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhiinya dapat mendatangkan hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesudah dewasa. (2) *Sekolah* memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan ritual sekolah dan kegiatan-kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap system politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut. Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. Sosialisasi juga dilakukan sekolah melalui berbagai upacara yang diselenggarakan di kelas maupun di luar kelas dan berbagai kegiatan ekstra yang diselenggarakan oleh OSIS. (3) *Kelompok pertemanan* mulai mengambil penting dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Takott Parson menyatakan kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini, orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figur otoritas pemberi transmitter proses belajar sosial, kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya peranan kelompok-kelompok klik, gang-gang remaja dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting. Dengan demikian pemberdayaan tiga institusi sosial di atas menjadi persoalan penting untuk meningkatkan pendidikan politik warga pada satu sisi, yang pada sisi lain diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif dalam menghakis sikap apatisme pemilih dalam pemilu. (*)

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell. Jr., 1995. *Comparative Politics Today: A World View*, New York: Harper Collins Collage Publishers.
- Axford, Barrie (et. al.).2002. *An Introduction Politics*, Second Edition. Lonson and New York: Routledge.
- Bowman, Ann O'M and Richard C. Kearney. 1999. *State and Local Government the Essential*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Bryman, Alan. 2004. *Social Reaserch Methods*, (second Edition). Oxford: University Press.

- Budiardjo, Miriam, dan Ibrahim Ambong. 1995. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. 1991. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Chaedar, Al. 2005. Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler. Jakarta: PT Darul Falah.
- Chilcote, Ronald H. 2004. Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Christina Holtz-Bacha, Political Disaffection, dalam dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, (California : Sage Publications, 2008) p.577-9.
- Cipto, Bambang. 2000. Partai, Kekuasaan dan Militerisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cohen, J. M., and Uphoff, N. 1997. Participation and Indigenous Knowledge in Rural Development. Cambridge, M.A: Abt Books
- Creswell, John W. 1994. Research Design, Quantitative and Qualitative Approaches. London: Sage Publication, Inc.
- Cronbach, L. J. 1951. Coeficient Alpha and The Interval Structure of Test. New York: Harper and Row Publisher.
- Dadan, Ramdhan, 2010. "Mendiskusikan Konsep dan Praktek Pendidikan HAM di Sekolah", Artikel Pendidikan Network.
- Daft, Richard L. 1992. Organization Behavior. San Fransisco: W. H. Freeman and Company.
- Dahl, Robert A. 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat (diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darmawan, Cecep. 2003. Pemilu 2004: Pencerahan Nalar Demokrasi dan Kemelekan Politik". Jurnal Civicus 1 (3), 28-236.
- Davis, Keith and Newstroom, John W, 1985. Organization Behavior: Human Behavior at Work (alih Bahasa Agus Dharma), NewYork: Mc.Graw Hill.
- Dewabrata, Bisma, 1995, Nilai-nilai Budaya Kerja dan Pengaruhnya pada Sikap kerja, Program Pascasarjana ITB, Bandung.
- Dhakidae, Daniel ; Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologi dan Program 1999-2004; KOMPAS 1999.
- Djatmiko, Yayat Hayati, 2002. Perilaku Organisasi. Bandung : Alfabeta.
- Gibson, James L., John. M. Ivancevich Dan James H. Dowaelly, Jr. 1994. Perilaku Organisasi. Terjemahan Makmuri Muchlas, Edisi ke 1. Yogyakarta: Gajah University Press.
- Greenstein, Fred. I, Nelson W. Posby. 1975. Hand Book Of Political Science Volume 2: Micropolitical Theory. Addison-Wesley Publishing Company Inc.: Philippines.
- Guilford, J.P. 1956. Fundamental Statistics in Psychology and Education, 3rd Edition. Mc. Grow Hill Book: New York.
- Hans, Kelsen, 2011. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Bandung: Nusa Media & Penerbit Nuansa.

- Harefa, Andrias, 2004. Membangkitkan Etos Profesionalisme. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herbert Kitschelt, The Logics of Party Formation : Ecological Politics in Belgium and West Germany, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1989
- Heri, Zulfan. 2005. Esai-Esai Politik Lokal: Legislator Menuai Kritik. Pekanbaru – Riau: ISDP.
- Heywood, Andrew. 2002. Politics (second edition). New York: Palgrave Foundation.